

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Aziz, A. (2023). Konflik norma hukum dalam kebijakan pertambangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 145–163.
- Pratama, A., & Santoso, B. (2022). Good Corporate Governance di sektor pertambangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 55–72.
- Rizal, H. (2021). Politik hukum pengelolaan tambang pasca UU Minerba. *OECD. (2015). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing. Jurnal Konstitusi*, 18(4), 765–784.
- Wibowo, S. (2022). Tata kelola pertambangan di Indonesia: Analisis hukum administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 201–220.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Sutanto, D. (2022). Conflict of interest dalam hukum perusahaan negara. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(4), 312–338.
- Fauzi, Ahmad & Idris, M. “Struktur Organisasi Perseroan Terbatas dan Implementasi Good Corporate Governance.” *Jurnal Hukum Bisnis*, 2021.
- Suryani, M. (2023). Transparansi dalam perusahaan tambang. *Jurnal Tata Kelola*, 6(1), 55–79.
- Savirani, L. (2025). Tambang, ormas, dan ketidakpastian hukum. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 11(1), 34–56.
- Liah, N. (2025). Ormas dan izin usaha pertambangan: Tinjauan yuridis. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(1), 45–67.
- Nasution, A. (2023). Problematika hukum ormas dalam bisnis pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 88–112.
- Damayanti, R. (2022). Good Corporate Governance di Sektor Pertambangan: Tantangan dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(2), 155–173.

- Suryani, Dian. "Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perusahaan Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2023.
- Sutanto, Budi. "Agency Problem dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Korporasi*, 2022.
- Pratama, Yudha. "Kontrol Negara terhadap Freeport Indonesia." *Jurnal Ekonomi Hukum*, 2021.
- Nasution, Andi. "Kepastian Hukum dalam Kebijakan IUP untuk Ormas." *Policy Brief Hukum Pertambangan*, 2023.

B. Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Damayanti, S. (2022). *Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan Pertambangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuady, M. (2011). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, R. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. 2022.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, A., & Idris, M. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas dan Implikasinya dalam Industri Pertambangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sjahdeini, S.R. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kencana.

Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

OECD. (2015). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD

Muchsin, M. (2015). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

C. Peraturan Perudnang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Ormas.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan .

D. Website

Kementerian Keuangan RI. (2023). *Realisasi PNBK Sektor Minerba 2022*.
<https://www.kemenkeu.go.id>

Kompas. (2023). “Polemik Izin Tambang untuk Ormas”.

CNBC Indonesia. (2023). “Kontroversi Perpres 70/2023 tentang Izin Tambang untuk Ormas”. <https://www.cnbcindonesia.com>

PT Freeport Indonesia. (2022). *Sustainability Report 2022*. <https://ptfi.co.id>